

BAB 1

PENDAHULUAN

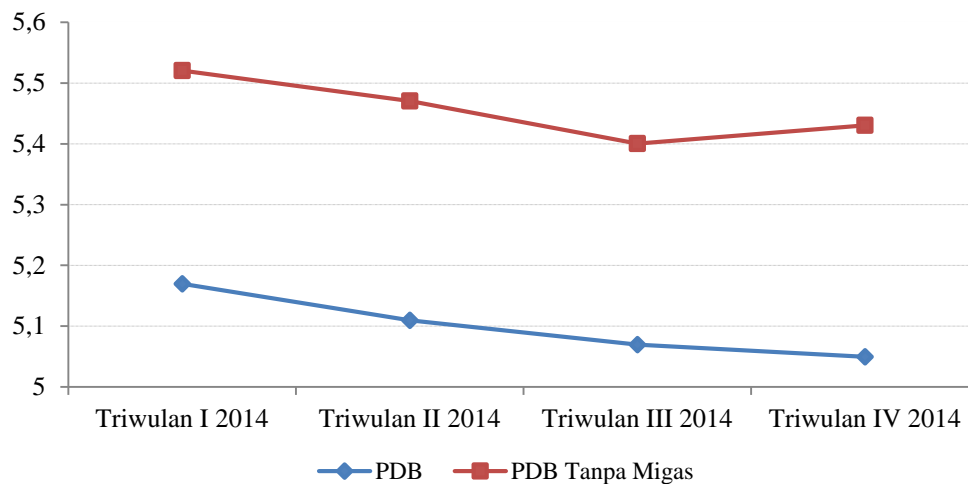
1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses yang mengandung pengertian pertumbuhan dan perubahan dimana usaha pelaksanaan pembangunan nasional ini diarahkan pada pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang tinggi tidak lepas dari peranan modal baik swasta maupun pemerintah. Sasaran pembangunan jangka panjang menitikberatkan pembangunan di bidang ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang berarti tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu tahun tertentu (Riandini, 2011:1-2).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hasil nyata dari pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil kegiatan ekonomi berada pada tingkat yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terbentuk dari berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang terlihat dari pendapatan nasional atau PDB (Riandini, 2011: 2).

Menurut Suparmoko (2002:5), pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia

kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Gambar 1.1.
Laju Pertumbuhan PDB Nasional
Berdasarkan Sektor Ekonomi (Lapangan Usaha)

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan III-2014 mencapai Rp746,6 triliun. Kenaikan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan III-2014 dibanding triwulan II-2014 mencapai 2,96%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2014 dibandingkan triwulan II-2014 pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 6,74%. Struktur PDB triwulan III-2014 didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,37%, 15,21% dan 14,26% (Badan Pusat Statistik).

Struktur perekonomian Indonesia secara parsial pada triwulan III-2014 masih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 58,51%, kemudian diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 23,63%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06% bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Dilihat dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang kontraksi 22,44% (Badan Pusat Statistik).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses pembangunan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan perkembangan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah untuk memanfaatkan penerimaan daerah guna mendukung perekonomian setempat untuk mengelola sumber daya yang ada dan juga untuk menggali dana serta membiayai pembangunan daerahnya masing-masing (Riandini, 2011: 2).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32/ 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Suryono, 2009:2). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan tingkat

kegiatan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu, meliputi seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah, sehingga PDRB secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan (Daryono, 1994: 19-20).

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah, ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987:86). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2009:1).

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto ADHK tahun 2000
Menurut Provinsi Tahun 2009-2013
(Miliar Rupiah)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
1. Banten	83.453,73	88.552,19	94.198,17	99.992,41	105.856,07
2. DKI Jakarta	371.469,50	395.622,44	422.242,25	449.805,42	477.285,25
3. Jawa Barat	303.405,25	322.223,82	343.193,56	364.752,40	386.838,84
4. Jawa Tengah	176.673,46	186.992,99	198.270,12	210.848,42	223.099,74
5. DI Yogyakarta	20.064,26	210.44,04	22.131,77	23.308,56	24.567,48
6. Jawa Timur	320.861,17	342.280,76	366.983,28	393.662,85	419.428,45
Jumlah 6 Provinsi	1.275.927,37	1.335.672,20	1.447.019,15	1.542.370,06	1.637.075,83

Sumber: Statistik Indonesia. 2009-2013. BPS.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa PDRB Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta. Jawa Timur dikategorikan memiliki kontribusi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan.

Pertumbuhan PDRB sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional, juga tidak bisa lepas dari peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang memberikan pembiayaan pada pihak ketiga yang merupakan sektor bisnis. Secara empiris, untuk menunjang pertumbuhan sektoral, dana pihak ketiga juga dialokasikan per sektor. Adapun sektor ekonomi yang dimaksud antara lain: (1) Sektor pertanian; (2) Sektor pertambangan dan penggalian; (3) Sektor industri pengolahan; (4) Sektor listrik, gas dan air bersih; (5) Sektor konstruksi; (6) Sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) Sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) Sektor jasa-jasa.

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki perekonomian yang kuat. Hal ini ditandai oleh sumbangan pertumbuhan dari sembilan sektor ekonomi dalam PDRB, yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2011 hingga mencapai 7,22%. Angka ini menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,23% (BPS, 2012: 32). Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, menurut studi dari *World Bank*, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh stabil karena tidak lepas dari dorongan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (*The World Bank*, 2011).

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah dan struktur perekonomian yang seimbang (Sukirno, 2007 dalam Hapsari, 2014: 89). Digunakan salah satu paradigma pembangunan untuk mencapai hal tersebut, yaitu melalui strategi pemberdayaan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional (Hapsari, 2014:89). UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian suatu negara atau daerah, karena bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007).

Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Penyaluran dana dalam bank syariah lebih akrab disebut dengan pembiayaan sedangkan pada bank konvensional sering disebut kredit. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Siswati, 2013:83). Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati posisi terbesar, pada umumnya sekitar 55% - 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield of financing*) merupakan penghasilan tertinggi bagi bank. Tingkat penghasilan dari

setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai (Arifin, 2006:53).

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank, salah satu penyebabnya adalah tingkat suku bunga yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (Kara, 2013:316). Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berwujud bank dan bukan bank. Lembaga keuangan perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu dari lembaga keuangan bukan bank syariah antara lain adalah pegadaian syariah (Sarwoko, 2009:173-174). Sumber modal eksternal lebih banyak mengandalkan pada sumber lembaga keuangan bukan bank, institusi dan informal sebagai alternatif, yang menawarkan pinjaman dengan pendekatan yang lebih mudah dan fleksibel sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM (Kaudin, 2005).

Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan sepanjang waktu. Semua satuan ekonomi baik individu maupun negara selalu menghadapi masalah-masalah tersebut (Hafidhuddin, 2002:67). Islam melarang umatnya menimbun harta dan atau membiarkannya tidak produktif. Harta harus senantiasa berputar agar lebih memberikan kemaslahatan bagi pemiliknya sendiri, bagi orang lain maupun lingkungannya. Zakat memiliki kemampuan untuk mendorong

perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang tergantung bagaimana pengelolaannya (Ryandono, 2012: 53-55).

Istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin (Amalia, 2012:72). Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Banyak pembahasan masalah dasar ekonomi Islam oleh pakar ekonomi syariah, ekonomi merupakan segala usaha yang memelihara berlangsungnya perputaran atau mengalirnya harta (sumber daya ekonomi) di antara manusia (Bank Indonesia, 2006:30).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Huwalladzî kholaqolakum-mâ fil-ardhi jamî'an-tsummastawâ ilas-samâi fasaw-wâ hunna sab-'a samâwâtin wahuwa bikulli syai-in 'alîm

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian semua dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah [2]: 29).

Ayat tersebut merupakan sebagian pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi. Dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non-materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan (Yusanto dan Yunus, 2009:66).

Ada kekhasan dalam menjawab masalah alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi dalam ekonomi Islam, yaitu eksistensinya sektor ketiga: *voluntary sector* atau *social sector*. Sektor ini menjadi pelengkap dan konsekuensi dari ketentuan syariah tentang zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lain-lain. Dilihat dari tujuannya, sektor ini tidak dapat dibedakan dengan sektor publik yaitu untuk kemaslahatan masyarakat banyak, bahkan secara spesifik sektor ini akan memfasilitasi golongan masyarakat kelas bawah untuk bisa secara aktif mengakses ekonomi (Bank Indonesia, 2006:30-31).

Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan zakat. Harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan mendayagunakannya. Dana zakat, infaq dan shadaqah didistribusikan ke arah konsumtif dan produktif. Ketentuan mustahiq untuk dana infaq dan shadaqah lebih fleksibel daripada ketentuan zakat, artinya pendistribusian infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya (Rahmah, 2014:68). Pendayagunaan dana infaq dan shadaqah melalui program bantuan modal usaha dengan akad qardul hasan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer, sedangkan infaq – shadaqah dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu umat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum (Bank Indonesia, 2006:35). Metwally mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh cukup positif pada ekonomi, karena instrumen zakat

akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang (harta), sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Sektor pertanian hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir keseluruhannya diusahakan oleh masyarakat baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian negara. Industri yang terkait dengan barang-barang tambang tentu menjadi sangat menarik untuk dikaji aspek zakatnya, karena merupakan harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek produksi (Hafidhuddin, 2002:89).

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi sangat tidak bisa dikesampingkan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam berbagai urusan (Fahmi, 2014: 1). Eksistensi lembaga perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi salah satu alternatif perbankan non-riba bagi masyarakat Jawa Timur. Selain sebagai alternatif perbankan, bank syariah juga dapat membantu mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi sektor riil melalui aktivitas usahanya, dalam hal ini pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah (Isretno, 2011).

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki perekonomian yang kuat dan telah mengimbangi kondisi perekonomian DKI Jakarta. Jawa Timur merupakan objek penelitian karena peneliti berasumsi bahwa perubahan pada tingkat regional akan menjadi penentu gerbang perekonomian suatu negara, sehingga pengkajian lebih mendalam dalam lingkup kecil dalam hal ini regional akan dapat membawa dampak besar bagi negara.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun bukan bank serta penyaluran dana zakat (ZIS) mempunyai peranan yang strategis dalam pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Kenyataan ini memposisikan UMKM sebagai suatu sektor strategis yang perlu mendapat perhatian dan pengembangan secara konsisten dan berkesinambungan (Kaudin, 2005). Maka dalam studi ini disusun judul Tesis; “*Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Jumlah UMKM dan PDRB di Jawa Timur Periode 2011-2014*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Apakah penyaluran dana ZIS mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah UMKM di Jawa Timur?
2. Apakah penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah UMKM di Jawa Timur?

3. Apakah penyaluran dana ZIS mempunyai pengaruh terhadap PDRB Jawa Timur?
4. Apakah penyaluran dana LKS mempunyai pengaruh terhadap PDRB Jawa Timur?
5. Apakah pertumbuhan jumlah UMKM mempunyai pengaruh terhadap PDRB Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan jumlah UMKM di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana LKS terhadap pertumbuhan jumlah UMKM di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap PDRB Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana LKS terhadap PDRB Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah UMKM terhadap PDRB Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini:

1. Bagi Akademisi

Sumbangsih akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi Islam pada khususnya, terutama dalam ekonomi makro perspektif Islam.

2. Bagi IPTEK

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wacana dan menambah kontribusi untuk pengembangan IPTEK yang terkait dengan ekonomi regional ataupun makro, yang berguna untuk evaluasi dan peningkatan potensi daerah Jawa Timur khususnya serta potensi seluruh Indonesia pada umumnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan acuan dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi regional di Indonesia.